

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan konsep otonomi daerah, konsep desentralisasi menyebabkan setiap daerah memiliki kewenangan tersendiri dalam mengelola daerahnya. Maka dari itu daerah tersebut berhak mengatur keuangannya sendiri. Selain itu penerapan pola ini membantu meringankan beban pemerintah pusat sehingga pekerjaan dapat dialihkan kepada pemerintah daerah dan juga tidak terjadi penumpukan kekuasaan pada satu pihak. Secara umum tujuan desentralisasi adalah agar terwujudnya suatu pemerintahan yang demokratis melalui pelayanan yang efektif, efisien dan ekonomis. Hal ini terdapat dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan UU No. 34 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Sudah menjadi tuntutan akan adanya transparansi kinerja pada era Reformasi pemerintahan di Indonesia. Dengan demikian, pemerintahan dituntut untuk memperkuat aspek transparansi dan akuntabilitasnya, yang keduanya penting dalam mengelola keuangan pemerintahan. Hal ini yang menimbulkan terjadinya proses peralihan pada sistem dekonsentrasi ataupun sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi. Timbulnya penggunaan konsep desentralisasi disebabkan keinginan masyarakat untuk mengungkapkan transparansi informasi kepada publik, dan masing-masing daerah perlu mandiri dalam mengatur roda pemerintahannya sendiri. Pemerintah daerah diperbolehkan mengeksplorasi potensi-potensi yang ada didaerahnya untuk memajukan pembangunan daerah, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta dapat meningkatkan kualitas pelayanan terhadap publik.

Pemerintah daerah diharapkan mandiri dalam mengatur keuangan daerah, karena mereka sendirilah yang paling mengetahui bagaimana kondisi dan potensi daerahnya masing-

masing. Keberhasilan pemerintahan daerah dalam mengatur keuangan ditunjukkan pada besarnya pendapatan daerah yang akan digunakan untuk membiayai kebutuhan belanja daerah. Secara garis besar, keuangan daerah terdiri dari pendapatan daerah, dana bantuan dari pemerintah pusat dan belanja daerah.

PAD (Pendapatan Asli Daerah) adalah pendapatan yang diterima suatu daerah dari sumber-sumber pendapatan di wilayahnya, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan pendapatan asli daerah yang lain. Menurut Abdul Halim (2004) “Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Hal ini diatur Peraturan Pemerintah Pasal 21 No. 58 Tahun 2005 mengenai “Pengelolaan Keuangan Daerah” dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Pasal 26 No. 13 Tahun 2006 mengenai “Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah” dan UU No. 23 Tahun 2014 mengenai “Pemerintah Daerah” pada pasal 285 .

Selain Pendapatan Asli Daerah, pemerintahan daerah juga menerima dana dari pemerintah pusat dalam bentuk Dana Perimbangan. Hal ini sesuai dalam pasal 10 undang-undang No. 33 tahun 2004 mengenai “Dana Perimbangan, yaitu persentase dana yang bersumber dari APBN yang disalurkan ke daerah-daerah untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah”.

Dana Perimbangan adalah dana persenan yang bersumber dari APBN pemerintahan pusat yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan daerah tersebut. Dana Perimbangan ini muncul karena adanya kesenjangan dan tidak meratanya keuangan dan otonomi daerah. Menurut Widjaja (2008) “Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.”

Alokasi modal ke daerah dengan cara bagi hasil yang didasarkan kepada daerah produksi cenderung akan mengakibatkan disparitas pendapatan antar daerah. Potensi finansial dan kepemilikan sumber daya alam (SDA) yang besar, terbatas pada sejumlah daerah tertentu saja. Peran Dana Alokasi Umum adalah dalam kemampuan untuk meningkatkan pemerataan dana mengingat potensi keuangan dan kebutuhan aktual dari masing-masing daerah.

Selanjutnya, seluruh belanja pemerintahan daerah pada suatu tahun anggaran disebut belanja daerah. Anggaran belanja daerah harus memiliki komposisi yang baik dalam memenuhi kebutuhan fasilitas publik agar mendapatkan kepercayaan publik kepada pemerintah. Dalam rangka peningkatan pelayanan publik tersebut, maka penyusunan anggaran alokasi belanja modal harus memprioritaskan kebutuhan publik. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan aktifitas ekonomi masyarakat yang akan selaras dengan pertumbuhan ekonomi investasi daerah tersebut. Hal ini juga disetujui oleh Dr. Rudy Badrudin (2017) “Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana kerja pemerintah daerah yang mencakup seluruh pendapatan atau penerimaan dan belanja atau pengeluaran pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan uang dan disetujui oleh DPRD dalam peraturan perundangan yang disebut Peraturan Daerah”.

Belanja modal merupakan perencanaan pengalokasian anggaran dalam rangka pembelian aset jangka panjang dengan umur ekonomis lebih dari satu periode akuntansi, seperti aset tetap, peralatan, pabrik, gedung, tanah, dan lain-lain. Menurut Darise (2008) Belanja Modal merupakan “*Pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian, pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan mesin, gedung, dan bangunan*”.

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan pedoman dan bahan masukan bagi pemerintahan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk mengelola keuangan daerah khususnya dalam penggunaan anggaran belanja modal serta menjadi bahan tinjauan akan pentingnya peningkatan pendapatan asli daerah sebagai sumber untuk membiayai belanja modal pemerintah. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menjadi acuan, referensi dan pembandingan bagi peneliti selanjutnya.

Didasarkan kepada latar belakang seperti yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal di Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Didasarkan kepada latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah PAD (Pendapatan Asli Daerah) berpengaruh signifikan terhadap belanja modal Pemerintah Provinsi di seluruh Indonesia?
2. Apakah dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal Pemerintah Provinsi di seluruh Indonesia?
3. Apakah PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal Pemerintah Provinsi di seluruh Indonesia?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Didasarkan pada rumusan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari:

1. PAD (Pendapatan Asli Daerah) terhadap belanja modal pada Pemerintah Provinsi di seluruh Indonesia
2. Dana perimbangan terhadap belanja modal pada Pemerintah Provinsi di seluruh Indonesia

3. Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja modal pada Pemerintah Provinsi di seluruh Indonesia

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini, penulis berharap dapat diambil beberapa manfaat yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Selain untuk menambah wawasan penulis, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh dari PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal Pemerintah Provinsi di seluruh Indonesia.

2. Bagi Pemerintah

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pemerintah mengenai pengaruh PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal Pemerintah Provinsi di seluruh Indonesia.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi bagi peneliti selanjutnya

#### 1.5 Sistematika Penulisan

Berikut dibawah ini sistematika penulisan dari penelitian ini yaitu:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini akan menyajikan pembahasan mengenai latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan, manfaat serta sistematika penulisan dari penelitian ini.

##### **BAB II LANDASAN TEORI**

Pada bagian ini akan menyajikan pembahasan mengenai landasan teori-teori dan konsep konsep umum yang berkaitan dengan topik permasalahan yang

diangkat, penelitian terdahulu, alur berpikir dan pengembangan hipotesis dalam penelitian ini.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bagian ini akan menyajikan pembahasan mengenai jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, sumber dan metode pengumpulan data, definisi operasional variabel penelitian serta teknik analisis data.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bagian ini akan menyajikan pembahasan mengenai hasil pengujian dari hipotesis yang telah diajukan dan menginterpretasikan hasil penelitian yang diperoleh.

### **BAB V PENUTUP**

Pada bagian ini akan menyajikan pembahasan mengenai kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, keterbatasan dan saran penelitian yang berguna untuk peneliti selanjutnya.

